

## **UNDANG-UNDANG MARIAGE POUR TOUSDAN HOMOFOBIA DI PRANCIS**

Astrid Vionisa Casondra<sup>1</sup>, Airin Miranda<sup>2</sup>

Universitas Indonesia<sup>1,2</sup>

astridcasondra@gmail.com<sup>1</sup>

airin.miranda@ui.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

France is one of the countries in the world that upholds individual freedom and equal rights for every citizen. This is evidenced by the policy regarding homosexuality in France which continues to develop over time. The first policy related to the recognition of homosexuals in France was the PACS (Pacte Civil de Solidarité) which was inaugurated in 1999. Then the latest development, on May 18, 2013 finally legalized same-sex marriage in France, known as *mariage pour tous*, namely marriage for all. With the *mariage pour tous* law, homosexuals in France can legalize their relationship through the original marriage bond by the state. Homosexuals people hope that with this law, the negative view of French society towards homosexuals can be eliminated. By using qualitative methods and literature study techniques as well as analysis of critical discourse theory by Norman Fairclough (1995), the result of the study shows that after the marriage law was legalized, acts of violence and discrimination by homophobic people still continued to increase in France.

**Keywords:** Homophobia, *Mariage Pour Tous*, Pacs, Homosexual in France

### **PENDAHULAN**

Saat ini, fenomena homoseksualitas sudah menjadi kenyataan yang bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Munculnya kaum homoseksual tidak ada sangkut paut dengan agama, kultur kebudayaan, seperti halnya yang kerap dianggap oleh masyarakat pada umumnya, pandangan mengenai perilaku kaum homoseksual kerap dianggap dominasi atau pengaruh dari negara barat atau bisa dikatakan sebagai suatu wabah penyakit yang menghilang dan muncul. Homoseksualitas adalah suatu bentuk ketertarikan seksual seseorang terhadap orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Kehidupan dalam berpasangan bagi kaum homoseksual sudah dianggap sebagai salah satu bentuk alternatif kehidupan berpasangan di Prancis yang dapat dilihat dengan adanya pengakuan resmi dari pemerintah mengenai keberadaan mereka melalui pelegalan pernikahan sesama. (Phinata,

2014). Menurut Zemmour (2014), pada kenyataannya kaum homoseksual di Prancis sudah memperjuangkan persamaan hak untuk mendapatkan pengakuan dalam ikatan pernikahan seperti pasangan heteroseksual sejak tahun 1970-an. Namun, UU *mariage pour tous* baru dilegalkan oleh pemerintah Prancis pada tahun 2013. Fenomena pernikahan sesama jenis merupakan sebuah realita di seluruh dunia karena Prancis merupakan negara ke-14 di dunia yang melegalkan pernikahan tersebut, setelah negara Eropa lainnya seperti Belgia yang sudah lebih dahulu melegalkan pernikahan sesama jenis sejak tahun 2003, kemudian Kanada pada tahun 2005, Norwegia pada tahun 2008, Swedia pada tahun 2009, Islandia pada tahun 2010 dan Denmark pada tahun 2012. Meskipun demikian, Prancis tetap menjadi negara yang sangat terbuka secara prinsip maupun hukum dalam menerima keberadaan kaum homoseksual (Zemmour,

2014). Di Prancis pernikahan sesama jenis dikenal dengan *mariage pour tous* yang merupakan pernikahan untuk semua pasangan dari berbagai orientasi seksual, baik heteroseksual maupun homoseksual. Pada tahun 2013 UU yang mengesahkan *mariage pour tous* disahkan pada masa pemerintahan Francois Hollande. Hollande adalah Presiden republik kelima yang saat kampanye mengeluarkan 60 *engagements*, yaitu komitmennya yang akan direalisasikan jika ia terpilih sebagai presiden. Beberapa dari janji kampanyenya adalah pelegalan pernikahan sesama jenis, hak untuk adopsi serta inseminasi buatan bagi pasangan kaum homoseksual. Hal tersebut merupakan jawaban dari permintaan yang diajukan oleh para pendukung pernikahan sesama jenis di Prancis. (Gaffney, 2015). Di awal tahun 2013, menurut INSEE sebuah institut riset resmi Prancis, jumlah pasangan homoseksual di Prancis berjumlah sekitar 100.000 pasangan dari 360.000 orang yang diwawancarai, yang berarti sekitar 28%.

Menurut Aryatama (2016), Prancis merupakan salah satu negara yang sangat mendukung dalam kebebasan individu dan juga persamaan hak bagi setiap warga negaranya sudah menanggapi permasalahan tindak diskriminasi dan telah melakukan upaya dalam melindungi hak-hak kaum homoseksual maupun pasangan homoseksual di Prancis. Pengakuan terhadap pasangan homoseksual di Prancis dimulai pada tahun 1999 melalui kebijakan *Pacte Civil de Solidarité* (PACS) yang merupakan sebuah bentuk legalisasi kehidupan bersama di luar pernikahan bagi sepasang orang dewasa dengan jenis kelamin yang berbeda maupun bagi sesama jenis. Kebijakan tersebut dibuat sebagai bentuk perkembangan dukungan yang diberikan pemerintah Prancis terhadap pasangan homoseksual. (Phinata, 2014).

Menurut Miranda (2001), dengan adanya kebijakan PACS sebagai sikap pemerintah Prancis yang mengatur kehidupan pasangan homoseksual, pemerintah Prancis

dianggap belum memenuhi semua hak dan kebutuhan kaum homoseksual. Dengan berjalannya waktu, isu penyempurnaan PACS terus disuarakan oleh kaum homoseksual dari tahun 2007 hingga 2012 dengan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh kaum homoseksual dengan cara melakukan pawai LGBT yang biasanya rutin dilaksanakan sekali setahun di kota-kota besar di Prancis. Tuntutan yang diajukan bermacam-macam, mulai dari penyempurnaan PACS hingga hak-hak yang didapatkan oleh pasangan heteroseksual (Phinata, 2014). Dalam konstitusi 4 Oktober 1958 dikatakan bahwa pada 23 Januari 2011, Conseil Constitutionnel menunjukkan hasil pengamatan terhadap posisi konstitusi Prancis terhadap pernikahan sesama jenis. Selama ini banyak demonstrasi yang menentang pernikahan sesama jenis menggunakan alasan bahwa pernikahan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Namun pada kenyataannya, menurut Conseil Constitutionnel, setelah mempelajari konstitusi dasar Prancis, konstitusi Prancis tidak melarang adanya pernikahan sesama jenis. (Phinata, 2014).

Pada 29 Januari 2013 terjadi perdebatan pada parlemen Prancis mengenai rancangan undang-undang *mariage pour tous*. Lebih dari 5000 amandemen dikeluarkan oleh kaum oposisi untuk rancangan undang-undang ini. Pada bulan April, RUU *mariage pour tous* masuk ke dalam senat dan dalam waktu yang sama Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) menunjukkan 53% masyarakat Prancis setuju atas rancangan undang-undang tersebut (Vignal, 2013).

### **Homofobia di Prancis**

Menurut Deumer (2018), homofobia adalah seorang individu yang menolak homoseksualitas serta menunjukkan ekspresi ketakutan, penghinaan, penolakan, dan kekerasan terhadap kaum homoseksual. Munculnya aksi homofobia di Prancis disebabkan masyarakat Prancis yang belum bisa mengakui hak-hak kaum homoseksual di

Prancis. Salah satunya adalah hak untuk menikah, yang merupakan hak mendasar setiap individu. Pasangan homoseksual Prancis mengharapakan pemerintah Prancis memperhatikan masalah keamanan pasangan homoseksual karena melalui pernikahan sesama jenis, pasangan homoseksual dapat memiliki hak-hak sipil yang terikat dalam lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis. Kaum homoseksual di Prancis sebenarnya sudah menuntut persamaan hak untuk bisa bersama dalam pernikahan seperti layaknya pasangan heteroseksual sejak tahun 1970-an. Namun, undang-undang untuk pernikahan sesama jenis baru resmi disahkan oleh Francois Hollande pada tahun 2013. Negara Prancis telah mengakui keberadaan kaum homoseksual maupun pasangan homoseksual dengan adanya UU *mariage pour tous*, namun kebebasan tersebut tidak membuat kaum homoseksual di Prancis dapat hidup dengan benar-benar bebas dan tenang (Zemmour,2014). Pada kenyataannya kaum homoseksual di Prancis masih dipandang “berbeda” hingga sekarang, bahkan mereka seringkali menjadi objek kekerasan dari kelompok homofobia.

Melalui artikel "*Agressions anti-LGBT en France: les victimes parlent davantage, la violence augmente*", Makooi Bahar (2018) mengatakan bahwa serangan dan hinaan oleh kaum homofobia di Prancis meningkat 15% sejak awal 2018. Menurut Clémence Zamora-Cruz, juru bicara Inter-LGBT, mengatakan banyak serangan tidak dilaporkan disebabkan para korban takut akan pembalasan atau takut menghadapi polisi, yang tidak mengetahui masalah identitas LGBT. Selain itu, kaum homoseksual takut suara mereka tidak didengar.

Menurut Aryatama (2016), beberapa kaum homoseksual masih memiliki ketakutan untuk mengungkapkan orientasi seksual mereka secara terbuka, salah satunya karena adanya diskriminasi selain itu beberapa kaum homoseksual juga telah menjadi korban serangan fisik dan verbal.

Berdasarkan beberapa kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat terlihat kaum homofobia juga tidak ingin kaum homoseksual mendapatkan hak-hak yang setara seperti kaum heteroseksual. Mereka juga memiliki ketakutan yang muncul saat berdekatan dengan kaum homoseksual dan, pada tahap tertentu, bisa mengarah pada tindak kekerasan, penyerangan atau penganiayaan terhadap kaum homoseksual seperti, diskriminasi, pelecehan seksual, pemerkosaan, serangan fisik maupun verbal. Diskriminasi tersebut terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, lesfobia, gayfobia, biofobia dan transfobia. Beberapa istilah tersebut merupakan gambaran bentuk penolakan mereka yang berbeda secara lebih spesifik, seperti lesfobia untuk kelompok lesbian, gayfobia untuk kelompok gay, biofobia untuk kelompok biseksual dan transfobia untuk kelompok transgender (Deumer, 2018).

Terdapat contoh beberapa kasus melalui laporan SOS Homophobie yang menunjukkan adanya peningkatan angka kekerasan yang mengkhawatirkan oleh kaum homofobia pada bulan Mei 2017 di Prancis. Pada tahun 2017 tercatat 139 kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum homofobia terhadap kaum LGBT, yang terlihat meningkat jika dibandingkan pada tahun 2016 terdapat 121 kasus. Tindak kekerasan tersebut meningkat 15% atau kira-kira sebanyak satu serangan setiap tiga hari. Kemudian setelah beberapa tahun menurun, serangan fisik tampaknya meningkat lagi pada tahun 2018. Menurut Deumer (2018), peningkatan pelanggaran yang dilakukan terjadi karena orientasi seksual atau identitas gender. Menurut laporan SOS Homophobie bahwa pada bulan September 2018, terdapat peningkatan kesaksian sebesar 37%.

Kasus homophobia di Prancis mencakup tindakan penolakan, hinaan dan pelecehan fisik yang sering terjadi di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial. aksi kekerasan ini juga dilakukan oleh berbagai kelas usia terhadap kaum homoseksual di

berbagai kesempatan yang beragam pula. Mulai dari antar teman hingga penolakan yang bersifat institusional karena menolak donor darah yang dilakukan oleh pendonor homoseksual. Sampai kini pun, belum ada pendidikan anti-homofobia yang diajarkan di sekolah (Rosz ewitch, 2015).

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa isu homoseksualitas dan homofobia di Prancis masih merupakan topik yang aktual untuk diteliti karena masih marak hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan pengaruh UU *mariage pour tous* terhadap aksi homofobia terhadap kaum homoseksual di Prancis. Ruang lingkup waktu penelitian dibatasi sejak disahkannya UU pada tahun 2013 hingga tahun 2018, yang merupakan akhir dari masa kepresidenan Hollande sebagai Presiden yang menjanjikan dan merealisasikan janjinya untuk mengesahkan UU pernikahan untuk kaum homoseksual.

## **METODE**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif. Menurut Brassard (2004, p.42), pendekatan kualitatif merupakan metodologi yang paling tepat untuk penelitian yang bergantung pada tingkat kedalaman data yang diraihinya dan pemahaman komprehensifnya tentang sebuah fenomena, dalam hal ini fenomena homofobia di Prancis, lebih khususnya lagi pernikahan sesama jenis. Dengan metode kualitatif bisa diteliti sikap dan pandangan kaum homofobia terhadap kaum homoseksual di Prancis setelah *mariage pour tous* dilegalkan. Berdasarkan metode penelitian tersebut maka, peneliti akan mengkaji masalah dengan melakukan studi yang bersumber dari artikel, jurnal ilmiah, dan teks berkaitan dengan topik permasalahan. Sumber data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori analisis wacana kritis dari Fairclough.

Menurut Fairclough (1997) sebuah teks bisa dianalisis karena menggunakan bahasa sebagai praktik sosial, seperti idealisme media dalam merepresentasikan sebuah berita dan menampilkannya dalam teks berita. Fokus

analisis wacana Fairclough yaitu, bagaimana cara melihat bahasa secara praktik dominasi dan juga melihat bagaimana cara suatu bahasa dibentuk dan terbentuk dari relasi sosial dan situasi sosial tertentu. Sementara menurut Sartini (2017), analisis wacana kritis menunjukkan bahwa dalam penggunaan bahasa pada suatu cerita dan tulisan terlihat realisasi atau praktik sosial sehingga dapat menunjukkan suatu paham ideologi, dan menghasilkan suatu relasi kekuasaan yang tidak setara dengan pria, wanita, kelas sosial bahkan kaum minoritas dan mayoritas yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki, perempuan, maupun kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan demikian unsur teks secara harfiah yang kerap melibatkan bahasa dalam suatu ruang tertutup yang digabungkan dengan suatu kondisi masyarakat yang lebih luas. Dalam analisis teori wacana kritis, penelitian ini akan diterapkan dalam mencapai pemahaman akan alasan masih terjadinya kekerasan yang dialami oleh kaum homoseksual sebagai korban dari kelompok homofobia di Prancis.

## **MARIAGE POUR TOUS DAN KAUM HOMOSEKSUAL DI PRANCIS**

Di bawah ini adalah pembahasan mengenai isu homophobia di Prancis pasca ditetapkan undang-undang *mariage pour tous* di masa kepemimpinan Fran ois Hollande. Pembahasan akan diawali dengan memperlihatkan hak-hak yang didapatkan oleh pasangan homoseksual dengan adanya undang-undang baru ini dan implementasinya di kehidupan nyata mereka sehari-hari.

### **1. *Mariage pour tous* dan hak-hak kaum homoseksual di Prancis**

Legalisasi pernikahan sesama jenis atau dikenal *mariage pour tous* di Prancis oleh Fran ois Hollande pada 18 Mei tahun 2013 merupakan suatu fenomena besar

yang diperdebatkan oleh masyarakat di Prancis. Menurut Phinata (2014), pada awalnya UU *mariage pour tous* dibentuk karena kaum homoseksual di Prancis masih merasakan adanya diskriminasi oleh pemerintah lewat PACS karena tidak diperuntukkan khusus bagi kaum homoseksual dan memiliki beberapa perbedaan yang cukup besar dengan pernikahan secara umum misalnya tidak adanya hak untuk mengadopsi anak atau melakukan inseminasi buatan.

Mengutip hasil penelitian Insée di awal tahun 2013, 35% dari pasangan homoseksual terikat PACS. Hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa PACS hanya digunakan oleh sepertiga dari pasangan homoseksual dan bukan menjadi suatu bentuk ikatan resmi yang dipilih oleh kaum homoseksual Prancis. Pada awalnya masih dianggap sebagai kebijakan yang paling menguntungkan, namun seiring berjalannya waktu, PACS dianggap perlu untuk disempurnakan karena dianggap masih ada perbedaan yang cukup besar antara hak dan kewajiban yang didapatkan dari PACS dengan pernikahan secara resmi, terutama dalam hal hak asuh anak, warisan dan inseminasi buatan bagi kaum homoseksual dan pasangan homoseksual. Menurut Miranda (2001), ada beberapa hak yang tidak bisa didapat oleh pasangan yang melakukan PACS sehingga hal ini yang membuat salah satunya pasangan kaum homoseksual ingin adanya *mariage pour tous* agar mendapat kesetaraan hak yang sama dan diakui secara resmi oleh pemerintah selayaknya pasangan heteroseksual yang menikah. Hal ini yang menunjukkan bahwa hukum di Prancis masih belum memberikan hak bagi pasangan homoseksual untuk memiliki anak. Undang-undang *mariage pour tous*, memberi harapan bagi kaum homoseksual

untuk menghilangkan diskriminasi dan mengubah mengubah cara pandang masyarakat yang selama ini memiliki prasangka negatif terhadap keberadaan pasangan homoseksual. Sebagai pasangan yang menikah resmi di hadapan hukum, pasangan homoseksual mendapatkan hak-hak yang sama dengan pasangan menikah lainnya yang merupakan pasangan heteroseksual, termasuk hak adopsi anak dan inseminasi buatan.

Sebagai pasangan yang menikah, undang-undang di Prancis melindungi hak pasangan yang ingin mengadopsi anak. Pada kenyataannya, kaum homoseksual masih mengalami kesulitan untuk melakukan adopsi dan hanya sedikit pasangan homoseksual yang mampu mengadopsi anak karena prosedur untuk melakukan adopsi anak bagi kaum homoseksual yang sangat sulit. Berdasarkan undang-undang yang membahas adopsi anak, orientasi seksual bukanlah salah satu kriteria yang menjadi syarat tertentu untuk dapat mengadopsi anak. Namun jika calon orang tua itu diketahui berorientasi homoseksual hal tersebut, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi petugas *les services sociaux*.<sup>1</sup> Dengan kata lain, seseorang akan sulit mendapatkan hak untuk mengadopsi anak apabila ia diketahui berorientasi homoseksual (Lestari, 2011).

Terdapat angka stabil 7000 pernikahan sesama jenis, namun sejak tahun 2013, jumlah anak yang diadopsi di luar negeri telah menurun 50% (Baralon, 2018). Salah satunya di Afrika Selatan, yang merupakan salah satu dari sedikit negara yang menerima adopsi oleh pasangan sesama jenis, namun hanya ada satu anak yang dapat dikirim ke keluarga Prancis pada tahun 2017 (Baralon, 2018). Laporan tersebut membuktikan bahwa setelah dilegalkannya

---

<sup>1</sup>“ *les services sociaux*” adalah orang-orang yang bekerja untuk melayani masyarakat yang mendapat kesulitan dalam hal pekerjaan, tatanan keluarga,

keuangan dan administrasi serta bertujuan untuk dapat memutuskan kelayakan seseorang untuk mengadopsi anak.

UU *mariage pour tous*, pasangan kaum homoseksual masih menemui kesulitan dalam hal adopsi anak. Pada masa sebelum UU *mariage pour tous* disahkan, pasangan homoseksual merasa terdiskriminasi. Hak-hak yang didapatkan oleh pasangan heteroseksual contohnya seperti, hak adopsi anak dan melakukan inseminasi buatan tidak bisa mereka dapatkan. Dengan disahkannya UU *mariage pour tous* pada tahun 2013, pasangan homoseksual mendapatkan kesempatan untuk mendapat hak-hak dalam mengadopsi anak dan inseminasi buatan. Namun, UU tersebut tampaknya belum bisa menjadi dasar hukum yang kuat sehingga masih banyak ditemukan kasus-kasus homofobia. UU *mariage pour tous* seharusnya memiliki kekuasaan dan wewenangnya untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan yang dibutuhkan oleh pasangan homoseksual. Dapat dilihat bahwa UU *mariage pour tous* setuju dengan adanya hak adopsi anak oleh pasangan homoseksual tetapi, masih terlihat sebagian masyarakat Prancis masih cenderung memiliki prasangka negatif terhadap hak adopsi yang dilakukan oleh pasangan homoseksual.

Mengutip hasil penelitian Lestari (2011), inseminasi buatan pada umumnya merupakan untuk wanita yang menginginkan seorang anak dengan cara pembuahan di luar rahim. Sebelum adanya UU *mariage pour tous* di Prancis, inseminasi buatan hanya diperbolehkan untuk pasangan yang sudah menikah. Namun peraturan UU di negara-negara tetangga seperti Belgia, Belanda dan Spanyol memiliki peraturan yang lebih mudah mengenai inseminasi buatan sehingga membuat banyak wanita Prancis, terutama kaum lesbian yang pergi ke berbagai negara tersebut untuk dapat melakukan inseminasi buatan. Di Prancis, pasangan homoseksual mengalami kesulitan dalam melakukan adopsi anak dan inseminasi buatan karena jika terjadi perceraian atau kematian orangtua, hak dan kewajiban anak akan sulit ditentukan, seperti

dalam hak asuh anak, domisili anak, serta pembagian warisan.

## **2. Reaksi kaum homofobia terhadap *mariage pour tous***

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa negara Prancis sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan (*liberté*), kesetaraan (*égalité*), dan persaudaraan (*fraternité*). Prinsip tersebut diharapkan dapat membawa Prancis menjadi negara yang tidak menerapkan diskriminasi terutama pada kaum homoseksual di Prancis. Pada kenyataannya meskipun undang-undang pernikahan untuk semua sudah disahkan, namun hal tersebut tidak berarti bahwa kehadiran kaum homoseksual dapat diterima secara penuh oleh masyarakat Prancis. Didukung oleh Fabre dalam artikel berita yang dimuat dalam *Le monde* pada tahun 2007 berjudul *1998, le pacs, vrai contrat et faux mariage*, mengatakan salah satu alasan yang memotivasi pasangan homoseksual untuk menuntut Pacs salah satunya adalah penyakit AIDS serta diskriminasi dan adanya ketidaksetaraan hak yang dialami oleh pasangan homoseksual di Prancis. Kelompok homofobia juga tidak ingin kaum homoseksual mendapatkan hak-hak yang setara seperti kaum heteroseksual. Terdapat bentuk penolakan yang dilakukan kaum homofobia terhadap kaum homoseksual di Prancis karena sampai saat ini ternyata mereka masih merasa takut terhadap kaum homoseksual, hal ini disebabkan oleh beberapa masyarakat yang masih memiliki stigma negatif yang melekat, bahwa homoseksualitas merupakan sebuah wabah atau penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian, seperti AIDS karena penyakit AIDS masih sangat sulit untuk disembuhkan (Deumer, 2018).

Kaum homoseksual merasa menjadi kaum minoritas karena telah mengalami diskriminasi dalam masyarakat semenjak

munculnya penyakit atau wabah AIDS di Prancis. Munculnya penyakit AIDS tersebut menyebabkan diskriminasi terhadap kaum homoseksual sehingga mereka merasa dirinya termasuk dalam kaum minoritas. Diskriminasi kelompok homofobia semakin berkembang hal ini, didukung oleh Isabelle Hennebelle dan Virginie Skrzyniarz dalam artikelnya yang dimuat dalam *L'express* tahun 2018 berjudul *Homos et adoption: le grand chemin* menyatakan bahwa alasan setelah dilegalkan UU *mariage pour tous* pada tahun 2013, sebagian masyarakat Prancis masih menentang dengan adanya hak adopsi anak. Salah satunya pada kasus pasangan homoseksual oleh Clement dan Romain mereka masih mengalami kesulitan dalam melakukan persyaratan mengadopsi anak setelah melewati beberapa persyaratan atau prosedur yang mereka telah lakukan namun hal ini belum membuahkan hasil yang baik, mereka berpendapat bahwa "pasangan seperti mereka" bukanlah prioritas. Menurut Hennebelle dan Skrzyniarz (2018), terdapat 20 kasus adopsi anak yang masih belum berhasil disebabkan karena kelompok homofobia yang tidak setuju dengan adanya hak adopsi dengan alasan yang sama selalu menghadirkan ketakutan adanya virus HIV AIDS, cacat visual atau motorik, trauma yang terkait dengan pelecehan. Dapat dikatakan hal ini adalah penyebab pasangan homoseksual masih mengalami kesulitan hingga sekarang dalam hak adopsi anak.

### **2.1 *Le Manif Pour Tous*: penolakan terhadap *mariage pour tous***

Negara Prancis masih memiliki tradisi agama katolik yang kental dan erat

dengan sejarah budaya Prancis. Agama katolik di Prancis juga melarang perilaku homoseksual yang sudah tertulis dalam kitab suci agama mereka. (Gaffney, 2015). Kaum gereja sangat menentang pernikahan sesama jenis. Pada awal tahun 2013 ketika UU *mariage pour tous* disahkan, muncul gerakan *le manif pour tous* yaitu suatu gerakan yang dibentuk untuk melakukan aksi protes terhadap UU *mariage pour tous*.

Hal tersebut disebabkan kelompok homofobia yang kontra dan cenderung memiliki pandangan konservatif terhadap prinsip pernikahan katolik yang memiliki pedoman yang tertulis dalam *Code de Civil des Francais* 1804<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Napoleon Bonaparte pada 1804. Menurut pandangan kelompok homofobia, mereka menentang hak-hak yang diberikan kepada pasangan homoseksual karena mereka belum bisa sepenuhnya menerima bahwa pasangan homoseksual bisa dan berhak memiliki anak. Menurut kelompok homofobia hal tersebut tidak baik untuk perkembangan mental bagi anak yang akan diadopsi oleh pasangan homoseksual (Gaffney, 2015). Menurut Lestari (2011), yang dikutip dari (Jean-Luc Aubert, 1997), seorang psikolog anak di Prancis, "*l'homosexualité est, par nature, un comportement mortel pour la société*". Pernyataan di atas merupakan opini yang memperlihatkan bahwa homoseksualitas akan menjadi penyebab utama "kematian" tatanan sosial. Hal tersebut dianggap benar karena kepercayaan akan agama mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk yang dapat menghasilkan keturunan. Hal itu kemudian dijadikan alasan untuk melawan kaum homoseksual. Homoseksualitas dikatakan dapat

---

<sup>2</sup> Menurut "*Code Civil*" sebuah pernikahan merupakan persatuan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keturunan dan memberikan warisan kepada anak mereka dan

berdasarkan prinsip bahwa setiap anak harus memiliki seorang ayah dan ibu

mematikan tatanan sosial karena kaum homoseksual sangat jauh dari prinsip "bereproduksi", sehingga lahirnya generasi baru akan terhambat. (Lestari, 2011).

Menurut Lestari (2010), negara Prancis adalah salah satu negara yang masyarakatnya masih belum dapat menerima sepenuhnya pasangan kaum homoseksual yang ingin melakukan adopsi. Karena jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang seperti itu sementara ia berasal dari keluarga yang dibesarkan oleh pasangan kaum homoseksual, maka hal itu akan menjadi suatu ancaman bagi kehidupan sosialnya. Contohnya seperti seorang anak yang mendapat perlakuan buruk dari temannya di sekolah. Segala bentuk kekerasan yang ia terima dari lingkungannya tentu akan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis seorang anak.

Menurut Chauvin dan Lerch (2013), berdasarkan hasil survei yang dibuat oleh *Contexte de la sexualité en France (CSF)* pada tahun 2006, pria dan wanita dari umur delapan belas tahun sampai enam puluh tahun mengaku pernah berhubungan seksual dengan sesama jenis. Untuk pria sebanyak 4,1% dan wanita 4%. Lalu angka itu terbagi lagi bahwa 6 % wanita dan 7,5 % pria di antaranya tinggal di perkotaan Prancis dan 3,2 % wanita dan 2,9 % pria tinggal di daerah pedesaan, kemudian didukung dengan laporan data menurut INSEE terdapat 100.000 pasangan homoseksual di Prancis. Berdasarkan hasil survei yang dibuat CSF dan data dari INSEE, dapat diperoleh pengetahuan bahwa jumlah kelompok homoseksual di Prancis tidak terlalu banyak dibandingkan kaum heteroseksual dan mereka ditemukan terutama di perkotaan. Jumlah kaum homoseksual yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kaum heteroseksual menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan tidak menyenangkan terhadap kaum homoseksual sebagai kaum minoritas.

Akhirnya muncullah diskriminasi terhadap kaum homoseksual yang berkembang menjadi homofobia. Sebagai penolakan terhadap UU *mariage pour tous*, gerakan *manif pour tous* menggunakan alasan agama dan kaitannya dengan tujuan pembentukan keluarga. Lebih jauh lagi, jumlah pasangan homoseksual di Prancis yang jauh lebih sedikit dibanding pasangan heteroseksual juga menempatkan kaum homoseksual sebagai kelompok minoritas. Mereka juga lebih banyak ditemukan di kota-kota besar di Prancis. Alasan kedua memperlihatkan kekuasaan kaum mayoritas terhadap kaum minoritas yang bahkan belum bisa diatasi dengan produk hukum setingkat UU yang bertujuan membela kepentingan semua pihak dengan orientasi seksual yang berbeda.

## **2.2 Aksi kekerasan terhadap kaum homoseksual di Prancis**

Setahun setelah dilegalkannya UU *mariage pour tous*, tercatat 328 kasus lesfobia dan homofobia yang dilaporkan kepada SOS Homophobie berupa penolakan, hinaan dan pelecehan fisik yang sering terjadi di dalam keluarga maupun di pergaulan sosial (Roszévitch, 2015). Pada tahun 2014 masih pada tahun yang sama, berdasarkan sebuah artikel dari situs *Libération* dengan judul "En Finir Avec Le Suicide Chez Les Jeunes Homosexuel-le-s" seorang pemuda bernama Peter ditemukan tewas di sebuah pusat kegiatan olahraga tempat dimana ia bekerja yang terletak di Albertville, di Région Rhône-Alpes pada tanggal 28 juni 2014 dibawah jembatan. Menurut beberapa sumber, pemuda tersebut tewas karena melakukan tindakan bunuh diri. Pemuda tersebut berusia dua puluh satu tahun itu diduga melakukan tindakan bunuh diri karena ia mendapat penolakan dari pihak keluarganya atas dasar orientasi seksualnya (Nietomertz,2014). Menurut artikel tersebut yang ditulis oleh Nietomertz (2014),

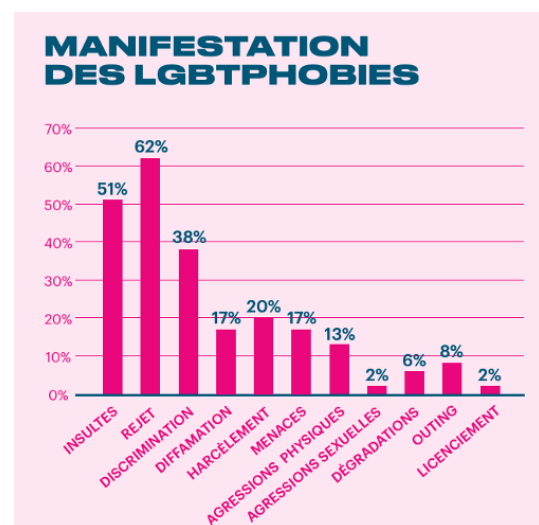


pemuda tersebut telah bergambang selama dua bulan dengan asosiasi Le Refuge, sebuah lembaga untuk penerimaan dan dukungan bagi orang dewasa dan remaja yang menjadi korban homofobia. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa sepuluh bulan sebelum kejadian tersebut, Peter telah menulis “*Mes parents deviennent de plus en plus hard dans leurs prières latines contre le diable. De toute façon, plus rien ne m'étonne après qu'ils aient fait appel à un prêtre exorciste pour me faire changer de bord.*”- “Orang tuaku semakin sering berdoa melawan iblis. Jadi, tidak aneh jika kemudian mereka memanggil pendeta pengusir setan untuk membuatku berpindah orientasi seksual” (terjemahan oleh penulis). Menurut Aryatama (2016), berita tentang kematian pemuda homoseksual ini banyak muncul di beberapa situs-situs di Prancis sehingga menjadi salah satu problematika yang dialami kaum homoseksual di Prancis. Di Prancis bunuh diri bukanlah satu-satunya masalah yang dialami oleh kaum homoseksual. Masih banyak lagi hal lain seperti kekerasan, diskriminasi, serta sikap penolakan dari masyarakat yang banyak ditunjukkan kepada kaum homoseksual.

Pada tahun 2017, organisasi SOS Homophobie memberikan laporan terdapat 211 kasus serangan fisik yang dilakukan oleh kelompok homofobia terhadap kaum homoseksual yang dilaporkan kepada SOS Homophobie dan menekankan bahwa *mariage pour tous* terutama pada “*gayphobic*” telah meningkat secara signifikan (Baralon,2018).

Pada tahun 2019 jumlah kasus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok homofobia terhadap kaum homoseksual semakin meningkat di Prancis. Jumlah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh kaum homoseksual baik kaum, lesbian, gay, biseksual dan transgender cenderung empat kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah bunuh diri yang dilakukan oleh kaum heteroseksual (Berton,2019). Mendukung hal tersebut

Aryatama (2016), yang dikutip dari INPES pada tahun 2005, sebanyak 10,8 % kaum homoseksual memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Angka ini berbanding terbalik dengan kaum heteroseksual yang melakukan bunuh diri, yang hanya sebanyak 5,6 %. Jumlah kasus bunuh diri pada kaum homoseksual pun terus meningkat.



Gambar 1. Jenis kekerasan LGBTfobia.  
(sumber: SOS Homophobie , 2018)

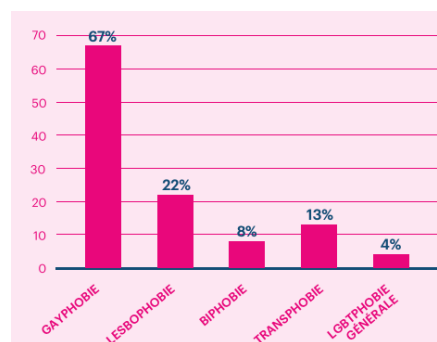
Tabel pada Gambar 1 menjelaskan bahwa setiap tahun SOS Homophobie mengidentifikasi berbagai bentuk LGBTfobia yang dilaporkan kepada SOS Homophobie. Penolakan dan penghinaan adalah bentuk yang paling banyak dilaporkan oleh korban LGBT sebanyak masing-masing 51% dan 62%. Hal itu menjadi latar belakang tingginya angka bunuh diri kaum homoseksual di Prancis. Walaupun grafik dalam Gambar 1 tidak memperlihatkan tingginya angka aksi kekerasan fisik, namun kekerasan verbal berupa penolakan dan penghinaan telah menyebabkan kaum homoseksual di Prancis merasa terisolasi, terusik, hingga mendorong mereka melakukan bunuh diri.

Lebih jauh, SOS Homophobie juga menyebutkan bahwa penghinaan tersebut kerap terjadi di jalan raya umum, sekitar 16%

di tempat-tempat terbuka untuk umum dan 7% di layanan publik. Selain itu, kekerasan juga sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga ataupun teman, sehingga menyebabkan tidak banyak laporan yang diajukan kepada organisasi SOS Homphobie mengenai penyerangan di tempat-tempat pribadi. Pada akhirnya, inilah yang membuat ragu kaum remaja di Prancis untuk mengakui jati diri mereka bahwa sebenarnya mereka adalah homoseksual. Menurut Balthazart (2010), banyak dari kaum homoseksual adalah remaja karena mereka masih memiliki perasaan takut dalam menghadapi diskriminasi dari kelompok homofobia. Namun demikian, banyak para remaja homoseksual yang takut terdiskriminasi oleh kelompok homofobia sehingga mengakibatkan mereka mengingkari perasaan tersebut sehingga menjadi tidak ingin terbuka “*coming out*” dan akhirnya kaum remaja mengalami depresi. Depresi yang dialami oleh kaum homoseksual berpengaruh pada tingkat bunuh diri pada remaja homoseksual pun secara signifikan. Menurut Cartier (2010), mengatakan bahwa satu dari empat remaja homoseksual di Prancis terhasut untuk melakukan bunuh diri. Alasan para remaja di Prancis memilih untuk bunuh diri, disebabkan para remaja tersebut kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kaum homofobia.

Menurut Nietomertz (2014), bahwa di Prancis, setiap tahun, terdapat 30% kaum homoseksual di bawah usia 25 tahun yang ingin mencoba bunuh diri, menurut laporan yang diserahkan ke Senat pada tahun 2013. Diketahui dari laporan tersebut bahwa 64% alasan bunuh diri di kalangan kaum remaja homoseksual adalah karena kerentanan dan ketakutan menghadapi orang lain, yang berarti menunjukkan bahwa mayoritas remaja yang ingin bunuh diri karena alasan homoseksualitas mereka yang disebabkan akibat penolakan dari keluarga (baik diderita

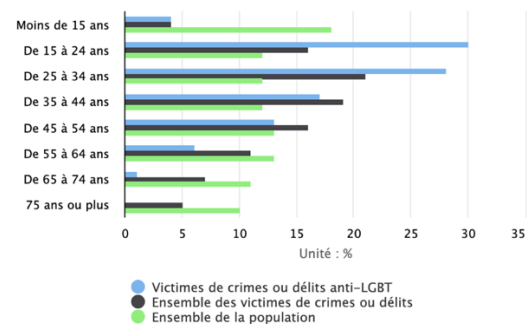
atau disengaja) dan rasa malu yang dirasakan oleh kaum remaja homoseksual. Penolakan, kesalahpahaman, dan ketakutan adalah semua kondisi dalam kehidupan para remaja kaum homoseksual. Mengacu pada buku laporan mengenai perilaku seksual (Kinsey, 1948 dan 1953), persentase kaum homoseksual di Prancis adalah 10% dari keseluruhan penduduk. Bila jumlah remaja di bawah usia 25 tahun adalah 30,6% dari keseluruhan penduduk Prancis (INSEE, 2013), maka potensi kematian remaja homoseksual di Prancis menjadi sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 1 juta remaja homoseksual per tahun. Masalah yang dipaparkan sebelumnya tentu berlawanan dengan prinsip negara Prancis yang menerima secara terbuka keberadaan kaum homoseksual. Hal ini kemudian memicu berbagai pertanyaan tentang peran negara Prancis dalam menjamin kebebasan hidup bagi seluruh warga negaranya, termasuk bagi kaum homoseksual. Kaum homoseksual berharap dengan adanya UU *mariage pour tous* segala diskriminasi dapat dihilangkan. Sikap dan pandangan masyarakat Prancis yang masih bertolak belakang dengan prinsip negara mereka memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat Prancis yang mendiskriminasi kaum homoseksual berdasarkan alasan homofobia, meskipun sudah ada UU *mariage pour tous* sehingga tindak kekerasan terhadap kaum homoseksual terus meningkat di Prancis.



Gambar 2.2. Grafik jenis korban dari *LGBTPHOBIA* (sumber: SOS Homophobie, 2019)

Pada tabel grafik 2.2 menurut laporan SOS Homophobie tahun 2019, dapat dilihat angka-angka pada gambar grafik tersebut adalah laporan data yang menunjukkan kesaksian atau bukti yang diterima oleh SOS Homophobie, dengan memperlihatkan bahwa serangan yang kuat dari kelompok LGBTfobia masih terus meningkat. Korban paling banyak adalah kaum homoseksual yaitu *gayphobie*. Menurut laporan data yang diterima dari SOS Homophobie pada tahun 2019 jenis serangan yang kerap terjadi pada kaum homoseksual adalah melalui serangan pemukulan sebanyak 64 %, pembunuhan sebanyak 2%, pemerkosaan 6 %, pelecehan seksual 6 % dan serangan yang tidak diketahui orang lain 29%. Melalui kesaksian yang diterima oleh SOS Homophobie, salah satu alasan mengapa kaum homoseksual paling banyak menjadi korban salah satunya mereka kerap dituduh dengan "mempromosikan homoseksualitas" dan korban dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dideritanya. *Observatoire des inégalités* menerbitkan artikel berjudul *Le nombre de crimes et délits anti-LGBT augmente* tahun 2020. Artikel ini mengatakan bahwa menurut kepolisian di Prancis tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok homofobia pada tahun 2019 meningkat pesat sejak 2016 tindak diskriminasi tersebut berupa penghinaan, kekerasan, dan ancaman. Sasaran korban yang paling banyak adalah pria remaja. Menurut kepolisian dari Prancis, korban diskriminasi dari serangan kelompok homofobia telah diamati bahwa sebagian besar adalah laki-laki (75%) dan lebih banyak adalah kaum muda. 58% berusia antara 15 dan 34 tahun, kelompok usia yang mewakili 37% korban dari semua kejahatan dan pelanggaran. Hanya 1% dari orang-orang yang menjadi sasaran tindakan ini berusia di atas 65 tahun, dibandingkan 12% dari semua jenis korban kejahatan.

Répartition des victimes d'actes anti-LGBT selon l'âge



Gambar 2.3. Grafik umur korban dari *LGBTPHOBIA* (sumber: Ministère de l'Intérieur – Observatoire des inégalités)

### 3. Sikap Kaum Homoseksual dalam Melawan Homofobia di Prancis

Kaum homoseksual tidak diam saja ketika mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan berupa tindak kekerasan dan diskriminasi oleh kaum homofobia. Berikut adalah beberapa respon dari kaum homoseksual di Prancis melawan homofobia.

#### 3.1 Pawai LGBT

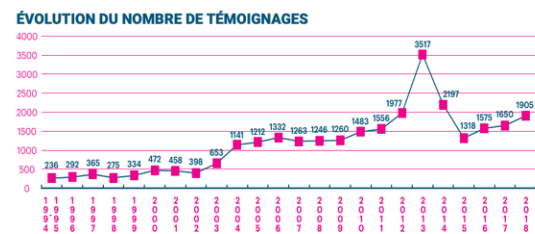
Dikenal juga dengan nama *Gay Pride*, pawai dilakukan setiap tahun dan merupakan demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di Paris yang diikuti oleh diorganisasikan oleh Inter-LGBT dengan tema "*Agissons pour l'égalité*" yaitu "Bergerak untuk Kesetaraan. Kaum homoseksual menitikberatkan pada kesetaraan dan diskriminasi (Baralon,2018). Gerakan sosial seperti ini, yang berkaitan dengan mendukung pergerakan homoseksual telah melakukan aksi sejak tahun 1970-an. Seorang pria muda Prancis mendeklarasikan dirinya sebagai seorang homo dengan berkata "*je suis homo, et alors?*". Setelah pengakuan dari pria tersebut, gerakan sosial yang mendukung keberadaan pasangan homoseksual dan LGBT Prancis semakin berkembang. Hal tersebut menunjukkan butuh waktu yang cukup lama bagi kaum homoseksual untuk

mendapatkan hak-haknya seperti status pernikahan di Prancis, adopsi anak dan inseminasi buatan. Sebelum dilegalkannya *mariage pour tous* di Prancis pasangan kaum homoseksual dan kaum LGBT meminta pemerintah untuk tegas dalam menangani masalah homofobia di Prancis. Homoseksualitas bisa menjadi alasan tersirat pemberhentian kerja. Bahkan kaum homoseksual pun tampak dijauhkan dari klien perusahaan tempat mereka bekerja karena homoseksualitas dianggap mengganggu. Hingga akhirnya, hal ini dapat memunculkan perasaan takut, malu, tertutup, aneh, hingga perasaan tidak nyaman dari kaum homoseksual itu sendiri (Deumer,2018). Pawai *Gay Pride* dilakukan pada setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda seperti kesetaraan hak untuk hidup, bekerja dan memiliki anak. salah satunya terdapat artikel berita yang dimuat dalam France 24 tahun 2019 berjudul “*Des dizaines de milliers de personnes défilent à Paris pour la Marche des fiertés*” pawai ini diikuti oleh puluh ribuan orang LGBT maupun individu yang mendukung gerakan ini. Dengan tujuan untuk mempertahankan pembukaan inseminasi buatan bagi semua kaum homoseksual karena saat ini kaum homoseksual masih kesulitan untuk melakukan inseminasi buatan. Pawai *la Marche des fiertés* dilakukan di ruang publik untuk menarik massa pendukung LGBT. Dengan adanya pawai *la Marche des fiertés* yang dilakukan oleh masyarakat, pendukung LGBT berusaha meningkatkan respon dari masyarakat dan reaksi dari Pemerintah.

### 3.2 SOS Homophobia

Kemudian kaum homofobia juga membentuk organisasi yang disebut SOS Homophobia yang melayani aduan kaum LGBT yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminasi. Terdapat diskriminasi di dunia kerja di Prancis yang menjadi alasan utama yang diajukan kaum homoseksual kepada organisasi SOS Homophobia. Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa pada tahun 2018, SOS Homophobia telah mengumpulkan sebanyak

1905 bukti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum homofobia terhadap kaum LGBT, meningkat 15% dibandingkan dengan data pada tahun 2017 sebanyak 1650.



Gambar 3.2. Aksi SOS Homophobia (sumber: SOS Homophobia, 2018)

Kemudian bisa dilihat puncaknya pada tahun 2012 menuju tahun 2013 jumlahnya mencapai 3517 di mana pada masa itu terjadinya perdebatan dan pengesahan UU *mariage pour tous*. Hal ini memperlihatkan kekhawatiran kelompok homofobia akan dilegalkannya undang-undang yang akan mengakui keberadaan pasangan homoseksual di Prancis. Saat itu kekerasan yang terjadi termasuk kekerasan fisik maupun verbal, pemerkosaan, pembunuhan dan pelecehan seksual. Berdasarkan laporan data statistik tersebut terlihat tingginya angka homofobia terhadap kaum LGBT di Prancis. Menurut Deumer (2018), pada tahun 2018 jumlah kasus tindak kekerasan mengalami peningkatan disertai dengan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam laporan tersebut tindak kekerasan yang dilaporkan kepada SOS Homophobia berupa serangan fisik dan sebagian besar membahayakan kaum LGBT. Kemudian jumlah serangan fisik yang dilaporkan ke SOS Homophobia meningkat dari 139, pada tahun 2017 menjadi 231 kemudian pada 2018, meningkat 66%. Data statistik tersebut adalah bukti nyata meningkatnya kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT.

Di Prancis masih banyak kasus tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya maka dari itu, untuk saat ini

kaum homoseksual maupun LGBT dapat melaporkan ke organisasi sosial yang disebut SOS Homophobie yaitu organisasi yang memperjuangkan kesetaraan hak dan perlakuan bagi kaum homoseksual di tengah-tengah masyarakat Prancis untuk melawan kaum homofobia. Dalam melawan homofobia, SOS Homophobie memiliki beberapa misi utama yaitu, memberikan dukungan atau *support* kepada kaum LGBT yang telah menjadi korban kekerasan ataupun diskriminasi. SOS Homophobie pada awalnya didirikan atas inisiatif para relawan pada 11 April tahun 1994 dengan tujuan awalnya untuk membangun dan mengembangkan bantuan bagi korban LGBT di Prancis, dengan cara membuat laporan tahunan. Pada tahun 2010 dan 2011 SOS Homophobie mulai berkembang dengan mengadakan berbagai acara seperti *The Trail of Sexualities* di Lyon, hari Internasional menentang homofobia, parade *gay pride* di Paris dan sekitarnya, hari perang melawan AIDS dan *LGBT Associations Printemps in Paris or the first LGBT Salon de Lille*, acara-acara tersebut dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak kelompok LGBT dan pada tahun 2012 SOS Homophobie terus terlibat aktif terkait isu-isu yang terkait dengan komunitas LGBT. Sejak tahun 2017 hingga sekarang, ketua asosiasi SOS Homophobie dipimpin oleh Joël Deumer, seorang aktivis hak dan kebebasan untuk para lesbian, gay, biseksual dan transgender.

SOS Homophobie menyediakan situs web dan nomor telepon untuk kaum LGBT bagi mereka yang ingin berbicara mengenai pengalaman ataupun masalah mereka terkait dengan diskriminasi ataupun tindak kekerasan, serta dapat mengirimkan kesaksian atau bukti mereka secara online melalui situs yang telah tersedia ([soshomophobie.org](http://soshomophobie.org)). Kemudian setelah organisasi menerima laporan-laporan tersebut, tindak selanjutnya akan dibantu oleh layanan hukum dengan cara mengajukan pengaduan

atau membawa gugatan perdata ke pengadilan. Lalu organisasi tersebut juga melakukan penyuluhan di seluruh negara Prancis untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dengan motivasi kebencian dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual di berbagai lingkungan.

### 3.3. Lobby politik

Dalam gambar 3.3 terlihat contoh lobby politik yang dilakukan oleh kaum homoseksual di Paris dengan mendekati politikus di Prancis untuk mendapatkan dukungan.



Gambar 3.3 Lobby politik  
(Sumber: SOS Homophobie, 2018)

Emmanuel Grégoire adalah seorang politikus Prancis dan merupakan anggota partai sosialis. Pada tahun 2018 Grégoire menjadi walikota Paris sebagai wakil pertama bersama Anne Hidalgo. Grégoire juga membidangi sumber daya manusia, pelayanan publik dan modernisasi pemerintahan dari 2014 hingga 2017 dan transformasi kebijakan publik dari 2017 hingga 2018. Grégoire mulai mendukung kaum homoseksual pada tahun 2018 hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang ditulis

oleh Emmanuel Grégoire, bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap kaum LGBT di kota Paris oleh kelompok homofobia. hal ini juga didukung pada artikel yang dimuat dalam Komitid tahun 2018 berjudul “*Emmanuel Grégoire: « Il n'est pas question que des individus mettent en danger la sécurité et la liberté » des LGBT+*” Komitid France merupakan media masa LGBT di Prancis, dibuat pada 23 April 2018 untuk memperingati 5 tahun undang - undang *mariage pour tous* yang sudah dilegalkan sejak tahun 2013.

Dalam artikel tersebut Grégoire ingin mempertemukan asosiasi LGBT dan otoritas publik untuk membuat *roadmaps* untuk melawan homofobia di Paris.

Tindakan diskriminasi seperti serangan fisik maupun verbal dari kelompok homofobia di kota Paris dianggap mengkhawatirkan sehingga Grégoire ingin memberi dukungan dan ide seperti mempertemukan asosiasi LGBT dengan otoritas publik yang memiliki peran dalam masalah ini dengan cara memberikan pencerahan dalam menghadapi semua serangan dari kelompok homofobia terhadap kaum homoseksual.

*Roadmaps* yang dibuat oleh Grégoire berisi dua tujuan yaitu berbagi informasi dengan masyarakat Paris dengan tujuan untuk memahami apa yang sedang terjadi di kota Paris. Grégoire dan organisasi LGBT ingin masyarakat Paris sadar bahwa serangan dari kelompok homofobia sering terjadi dan dikhawatirkan akan terjadi peningkatan. Baik Grégoire maupun organisasi (LGBT) merasa tidak mampu untuk mengetahuinya secara pasti karena keterbatasan sumber daya. Grégoire juga menekankan bahwa hal tersebut dapat ditanggapi lebih serius oleh pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian memiliki sumber daya yang mumpuni. Kedua adalah memberikan tindakan preventif kepada masyarakat khususnya kelompok homofobia untuk mencegah hal semacam ini terjadi lagi. Kehadiran semua pihak

dirasa perlu baik di sisi preventif dan sisi komunikasi. Grégoire juga ingin data-data tuntutan dan pengaduan terkait aksi homofobia terverifikasi dengan baik. Tuntutan pidana, tanggapan jaksa dan hukuman diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Dapat terlihat bahwa kaum LGBT ingin suara mereka didengar oleh publik melalui surat yang ditulis Emmanuel Grégoire.

Surat Grégoire sebagai politisi Prancis menunjukkan dukungan pemerintah untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada kaum homofobia yang melakukan tindak kekerasan atau diskriminasi terhadap kaum homoseksual. Hal inilah yang dibutuhkan oleh kaum homoseksual Prancis yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan yang layak dalam hidup mereka.

## **KESIMPULAN**

Undang-undang *mariage pour tous* memberi harapan bagi kaum homoseksual di Prancis untuk kehidupan berpasangan yang dilindungi dan diakui oleh pemerintah. Dilegalkan pernikahan bagi kaum homoseksual membuka pintu bagi kemungkinan membentuk keluarga dengan hak adopsi dan inseminasi buatan. Namun hal ini tidak langsung mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Prancis. Melalui gerakan *le manif pour tous*, protes dan penolakan terhadap kaum homoseksual yang dianggap menyimpang diperlihatkan oleh kelompok homofobia di Prancis. Mereka mengangkat nilai-nilai tradisi di Prancis, yaitu memiliki kultur agama katolik yang erat dengan sejarah serta larangan atas perilaku kaum homoseksual. Merujuk pada Alkitab, masyarakat Prancis yang menjalankan prinsip pernikahan kristiani dan berpedoman pada *Code de Civil des Français* 1804, menentang keras UU *mariage pour tous* ini.

Aksi kekerasan dan tingginya angka bunuh diri di kalangan homoseksual di

Prancis, seperti ditunjukkan oleh data dari SOS Homophobie, menunjukkan bahwa produk hukum pemerintah di masa Hollande ini belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pada praktiknya, kaum homoseksual masih menerima tindakan diskriminasi yang beragam, mulai dari verbal hingga fisik, hingga politik. Dan hal itu terjadi baik di tingkat keluarga maupun birokrasi yang bisa menyulitkan mereka dalam proses-proses yang dibutuhkan dalam hal adopsi dan inseminasi buatan. Sebagai kaum minoritas, hak-hak kaum homoseksual belum dilindungi dengan UU ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa UU *mariage pour tous* tidak mengurangi dan mengubah permasalahan homoseksual karena kasus homofobia masih terus ada dan meningkat. Lebih jauh lagi diperlukan sebuah aksi dari pemerintah yang bukan hanya memberi hak bagi kaum homoseksual lewat produk hukumnya, namun juga dapat memberi perlindungan dan menjatuhkan sanksi hukum bagi pelanggarnya, dalam hal ini kelompok homofobia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aryatama, M. A. (2016). Kecenderungan Media Online Prancis Terhadap Problematika Homoseksual di Prancis. Universitas Negeri Jakarta
- Balthazart, J. (2010). *Biologie de l'Homosexualité*. French
- Baralon, M. (2018). Cinq ans après son adoption, le "mariage pour tous" en chiffres. Diakses dari: <https://www.europe1.fr/societe/cinq-ans-apres-le-mariage-pour-tous-en-chiffres-3631682>
- Berton, E. (2019, 17 Mei). Assaults on the LGBT+ community hit a record high in France last year. Di akses dari: <https://www.weforum.org/agenda/2019/05/dark-year-for-france-as-lgbt-assaults-hit-record-in-2018/>
- Blin, S. (2015, Februari 5). Homophobie : La Campagne Choc de 4 L'Inter-LGBT Diakses dari: <https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/02/05/01016-20150205ARTFIG00227-homophobie-la-campagne-choc-de-l-inter-lgbt.php>
- Borrillo, D. (2010). *L'homophobie*. Université Paris Nanterre
- Cartier, E. (2010). Le Suicide: un mal homosexuel. Diakses dari: <https://scribium.com/emiliecartier/a/le-suicide-un-mal-homosexuel>
- Deumier, J. *Rapport sur l'homophobie* (2018)
- Fauzan, U. (2013). Analisis wacana kritis model Fairclough. *Jurnal Pendidik*, 5 (2), 1-10.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson.
- France 24. (2019). *Des dizaines de milliers de personnes défilent à Paris pour la Marche des fiertés*. diakses dari : <https://www.france24.com/fr/20190629-dizaines-milliers-personnes-defile-paris-marche-fiertes-pma-homosexualite-lgbt>
- Gaffney, J. (2015). *France in the Hollande presidency: The unhappy republic*. Basingstoke: Palgrave MacMillan. Diakses dari: <http://www.leparisien.fr/reactions/reactions/societe/les-associations-anti-mariage-gay-seront-recues-a-l-elysee-21-01-2013-2499459.php>
- Henebelle, Skryniarz. *Homos et adoption: le grand chemin*. *L'Express* 23 juni 2018. Diakses dari: [https://www.lexpress.fr/actualite/societe/homsetadoptionlegrandchemin\\_2019700.html](https://www.lexpress.fr/actualite/societe/homsetadoptionlegrandchemin_2019700.html)
- KOMITID. (2018). *Emmanuel Grégoire : « Il n'est pas question que des individus mettent en danger la sécurité et la liberté » des LGBT+* diakses dari:

- <https://www.komitid.fr/2018/10/18/emmanuel-gregoire-il-est-pas-questionne-des-individus-mettent-en-danger-la-securite-et-la-liberte-des-lgbt/>
- Lestari, Muninta. (2011). *Pandangan Terhadap Keluarga Homoparantale di Prancis Pada Kurun Waktu 1999 – 2009*. Universitas Indonesia.
- Le Parisien. (2013). *Les associations anti-mariage gay seront reçues à l'Elysée*. diakses dari: <https://www.leparisien.fr/societe/les-associations-anti-mariage-gay-seront-recues-a-l-elysee-21-01-2013-2499459.php>
- Miranda, A. (2001). *Kebijakan Pemerintah Prancis terhadap Keberadaan Pasangan Homoseksual di Prancis pada Dasawarsa 1970-1990*. Universitas Indonesia.
- Nietomertz, M. (2014). *En finir avec le suicide chez les jeunes*. Diakses dari: [https://www.liberation.fr/societe/2014/07/03/en-finir-avec-le-suicide-chez-les-jeunes-homosexuel-le-s\\_1056519](https://www.liberation.fr/societe/2014/07/03/en-finir-avec-le-suicide-chez-les-jeunes-homosexuel-le-s_1056519)
- Phinata, A. (2014). *Representasi Kaum Homoseksual dalam Lagu Prancis sejak PACS hingga Kebijakan Le Mariage pour tous*. Universitas Indonesia
- Roszéwitch, Y.(2015). *Rapport sur l'homophobie* 2015. SOS Homophobie.
- Saraswati, A. (2017). *Wacana Perlawanan Persebaya 1927 terhadap PSSI: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*. *Mozaik Humaniora*, 17 (2), 181-191.
- SOS Homophobie. (2019). *Rapport sur L'homophobie*. Diakses dari: [https://www.soshomophobie.org/sitdefaultfiles/rapport-homophobie\\_2019\\_interactif.pdf](https://www.soshomophobie.org/sitdefaultfiles/rapport-homophobie_2019_interactif.pdf)
- Vignal, F (2013, April 15). *Mariage pour tous: le détail du vote au Sénat*. Diakses dari: <https://www.publicsenat.fr/lcp/politique/mariage-tous-d-tail-vote-s-nat-366892>
- Zemmour, Eric. 2014. *Le Suicide Français*. Paris : Albin Michel.